



Analisis Daya Saing Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Bawang Merah Di Kabupaten Solok

Mega Putri Nolasary

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima Redaksi: Agustus 2019
Revisi Akhir: September 2019
Diterbitkan Online: Desember 2019

KATA KUNCI

Dayasaing, Matriks Analisis Kebijakan, Usahatani Bawang Merah, Hortikultura

KORESPONDENSI

Telepon: +6282169039345
E-mail: megaputrinolasari01@gmail.com

A B S T R A C T

This study aims to analyze competitive and comparative advantages, and the impact of government policies on competing shallots in Solok Regency. The study was conducted on Nagari Sungai Nanam, farmers as respondents. Data analysis uses the Policy Analysis Matrix (PAM) method. The results of the analysis of this study indicate that (1) shallots in Solok Regency have competitive advantage, but for comparative advantage it is not, due to farming done by farmers is still not efficient in terms of cost. (2) to see the impact of government policies for the above 2 namely input and output policies. On the impact of input policy, it is still relatively low, namely NPCI = 1.75 while for output policy, the value of NPCO = 7.30 means that the policy on output has been effective.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bawang merah bagian dari komoditi sektor pertanian hortikultura yang merupakan sayuran unggulan nasional yang mempunyai peran cukup penting dan perlu dikembangkan dengan intensif. Bawang merah berada pada urutan ketiga dari komoditi sayuran unggulan nasional dengan kontribusi produksi sebesar 1.233.984 ton pada tahun 2014. Sentra produksi bawang merah di Indonesia adalah pulau Jawa dengan total produksi sebesar 956.652 atau sekitar 77,53 % dari total produksi bawang merah nasional. Sedangkan provinsi penghasil bawang merah terbesar di luar Jawa adalah Nusa Tenggara Barat dengan produksi sebesar 117.531 ton atau sekitar 9,52 % dari total produksi bawang merah nasional dan selanjutnya diikuti oleh Sumatera Barat dengan total produksi 61.329 ton atau sekitar 4,97% dari total produksi bawang merah nasional.

Dalam kurun waktu satu dekade ini, produksi bawang merah Indonesia masih berada pada

angka 9,9 ton/ha. Pertumbuhan produktifitas bawang merah yang lambat ini tentu akan mempengaruhi daya saing bawang merah lokal untuk mengisi permintaan. Terlebih jika jumlah produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan. Selain itu, kenaikan harga bawang merah sangat berfluktuatif dimana harga domestik kembali melesat tinggi akibat kenaikan harga BBM dan hari raya Idul Fitri yakni pada bulan Juni - Agustus 2013 harga bawang merah mencapai Rp 60.000/kg. Tidak heran jika pemerintah mengambil langkah untuk melakukan impor bawang merah. Hal – hal seperti bea masuk, kepentingan perdagangan dan harga yang lebih murah telah ikut mendorong maraknya impor bawang ke Indonesia. Bawang merah biasanya diimpor dari Thailand, Vietnam dan Filipina yang saat ini masih membanjiri di provinsi – provinsi Indonesia.

Produksi bawang merah di Kabupaten Solok pada tiga tahun terakhir yakni tahun 2012 – 2014 terus mengalami peningkatan produksi yaitu di tahun 2014 sebesar 58.502 ton dengan persentase peningkatan 30,33 %, tahun dibandingkan tahun 2013

dengan total produksi 40.757,1 ton. Kabupaten Solok terdapat 14 kecamatan. Kecamatan Lembah Gumanti merupakan daerah penghasil bawang merah terbanyak yaitu sebesar 38.639,9 ton pada tahun 2014

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana nilai daya saing dilihat dari keunggulan kompetitif dan komparatif bawang merah dan dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing bawang merah di Kabupaten Solok

Tujuan penelitian

1. Menganalisis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif bawang merah
2. Menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing bawang merah

TINJAUAN PUSTAKA

Dayasaing.

Konsep dayasaing merupakan aspek penting dalam perdagangan suatu produk sebagai salah satu strategi untuk memasuki pasar ekspor, karena pada hakekatnya persaingan mencerminkan kesanggupan untuk memenangkan pangsa pasar. Konsep dayasaing yang umum dipahami adalah "*kemampuan suatu komoditas untuk bersaing yang mencerminkan kesanggupan untuk memenangkan pangsa pasar*". Suatu komoditas dapat mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif sekaligus, yang berarti komoditas tersebut menguntungkan untuk diproduksi atau diusahakan dan dapat bersaing di pasar internasional. Apabila komoditas yang diproduksi di suatu negara hanya mempunyai keunggulan komparatif namun tidak memiliki keunggulan kompetitif, maka di negara tersebut dapat diasumsikan terjadi distorsi pasar atau terdapat hambatan - hambatan yang mengganggu kegiatan produksi sehingga merugikan produsen, seperti prosedur administrasi, perpajakan dan lain - lain. (Suradisastira 2014 dalam Balitbang Pertanian 2014, hal 49).

Sudaryanto dan Simatupang (1993 dalam Daryanto 2009, hal.13) menjelaskan bahwa konsep keunggulan komparatif merupakan ukuran dayasaing (keunggulan) potensial dalam artian dayasaing yang akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi. Dengan kata lain komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki keunggulan efisiensi secara ekonomi. Istilah keunggulan komparatif (*comparatif advantage*) pertama kali dikenalkan oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa meskipun suatu negara kurang efisien dibandingkan dengan negara lain dalam memproduksi dua komoditi namun masih melakukan perdagangan yang saling menguntungkan untuk

kedua belah pihak, dengan asumsi proporsi kerugian absolut satu negara pada komoditi tersebut tidak sama (Salvatore, 1997). Kelemahan keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo ini hanya didasarkan pada perbedaan produktivitas setiap tenaga kerja saja. Tenaga kerja bukanlah satu - satunya faktor produksi yang berpengaruh dalam menentukan keunggulan komparatif melainkan masih terdapat faktor lain seperti teknologi, modal, tanah dan sumberdaya lainnya.

Keunggulan kompetitif adalah alat untuk mengukur kelayakan aktivitas atau keuntungan privat yang dihitung berdasarkan harga pasar nilai uang resmi yang berlaku (berdasar analisis finansial). Komoditi yang memiliki keunggulan kompetitif dikatakan juga memiliki efisiensi secara finansial.

Keunggulan kompetitif menyatakan bahwa kondisi alami tidaklah perlu untuk dijadikan penghambat, karena keunggulan pada dasarnya dapat diperjuangkan. Keunggulan suatu negara bergantung pada kemampuan perusahaan-perusahaan di dalam negara tersebut untuk berkompetisi dalam menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar. Suatu negara memperoleh keunggulan dayasaing jika perusahaan kompetitif. Dayasaing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya

Kebijakan Pertanian

Kebijakan adalah intervensi pemerintah untuk mengubah perilaku produsen dan konsumen. Secara umum tujuan dari kebijakan pemerintah dapat dibagi kedalam tiga tujuan utama yaitu efisiensi (*efficiency*), pemerataan (*equity*), dan ketahanan (*security*). Efisiensi tercapai apabila alokasi sumberdaya ekonomi yang langka mampu menghasilkan pendapatan maksimum, serta alokasi barang dan jasa yang menghasilkan tingkat kepuasan konsumen yang paling tinggi. Pemerataan diartikan sebagai distribusi pendapatan diantara kelompok masyarakat atau wilayah yang menjadi target pembuat kebijakan. Biasanya pemerataan yang lebih baik akan dicapai melalui distribusi pendapatan yang lebih baik atau lebih merata. Ketahanan akan meningkat apabila stabilitas politik maupun ekonomi memungkinkan produsen maupun konsumen meminimumkan biaya penyesuaian (*adjustment costs*).

Cakupan kebijakan pertanian dibatasi oleh tiga kendala utama yaitu penawaran. Permintaan dan harga dunia. Penawaran, produksi nasional dibatasi oleh ketersediaan sumberdaya (lahan, tenaga kerja dan modal), teknologi, harga input dan kemampuan manajemen. Permintaan, konsumsi nasional dibatasi atau dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pendapatan, selera, dan harga output. Harga dunia untuk komoditas yang diperdagangkan secara internasional

baik input maupun output, menentukan dan membatasi peluang untuk mengimpor dalam rangka meningkatkan suplai domestik dan mengeksport dalam rangka memperluas pasar bagi produk domestik. Kendala – kendala ekonomi ini bisa mengarah terjadinya *trade-off* dalam pembuatan kebijakan.

Kebijakan – kebijakan yang mempengaruhi sektor pertanian dapat digolongkan menjadi tiga kategori yaitu kebijakan harga, kebijakan makroekonomi, dan kebijakan investasi publik. Kebijakan harga komoditas pertanian merupakan kebijakan yang bersifat spesifik komoditas. Setiap kebijakanditerapkan untuk satu komoditas. Kebijakan harga juga bisa mempengaruhi input pertanian. Kebijakan makroekonomi mencakup seluruh wilayah dalam satu negara, sehingga kebijakan makroekonomi akan mempengaruhi pengeluaran investasi (modal) yang bersumber dari anggaran belanja negara. Kebijakan ini bisa mempengaruhi berbagai kelompok produsen, pedagang dan konsumen dengan dampak yang berbeda karena dampak tersebut bersifat spesifik pada wilayah dimana investasi itu dilakukan. (Pearson *et al*, 2005 hal.8).

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga April tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Dalam penelitian ini, petani responden adalah petani yang mengusahakan tanaman bawang merah. Penentuan petani dilakukan secara *multistage random sampling*. Untuk mempermudah dalam melihat perbandingannya maka luas lahan akan dikonversikan ke luasan Hektare (Ha).

Guna memudahkan dalam pengumpulan data untuk mencapai tujuan penelitian maka, variabel – variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :1) Identitas petani sampel, 2) Jumlah produksi bawang merah , 3) Harga privat bawang merah, 4) Faktor produksi terdiri dari pupuk anorganik, pupuk kandang, pestisida, peralatan, lahan, bibit bawang merah, dan tenaga kerja pada harga privat, 5) Harga dunia bawang merah, 6) Harga dunia pupuk anorganik yang digunakan petani , 7) Nilai tukar dollar terhadap rupiah.

Pada penelitian ini , analisis daya saing yang digunakan adalah *Policy Analysis Matrix* (PAM). Model Policy Analysis Matrix (PAM) dengan rumus formulasi seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel Matriks Analisis Kebijakan (PAM)

Keterangan	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Input Tradable	Faktor Domestik	
Harga Privat	A	B	C	D
Harga Sosial	E	F	G	H
Efek Divergensi	I	J	K	L

Sumber : Pearson *et al*, 2005

Keterangan :

Keuntungan Privat	: $D = A - B - C$
Keuntungan Sosial	: $H = E - F - G$
Transfer Output	: $I = A - E$
Transfer Input	: $J = B - F$
Transfer Faktor	: $K = C - G$
Transfer Bersih (J + K)	: $L = D - H = I - (J + K)$
Rasio Biaya Privat	: $PCR = C / (A - B)$
Rasio Biaya Sumberdaya Domestik	: $DRCR = C / (E - F)$
Koefisien Proteksi Output Nominal	: $NPCO = A / E$
Koefisien Proteksi Input Nominal	: $NPCI = B / F$
Koefisien Proteksi Efektif (E - F)	: $EPC = (A - B) / (E - F)$
Koefisien Keuntungan	: $PC = D / H$
Rasio Subsidi Untuk Produsen	: $SRP = L / E$

Adapun langkah – langkah menganalisis daya saing dengan PAM adalah sebagai berikut ;

- Analisis Keuntungan : dilihat dari Keuntungan privat (KP) yaitu Apabila $KP > 0$, berarti kebijakan pemerintah atau komoditi yang diusahakan secara finansial menguntungkan. Sebaliknya jika nilai $KP < 0$ maka kegiatan usaha tidak menguntungkan pada kondisi intervensi pemerintah terhadap input dan output. Keuntungan sosial yakni Apabila $KS > 0$, kondisi pasar yang terjadi yakni persaingan sempurna, kegiatan perusahaan komoditi dapat dilanjutkan karena menguntungkan atau memiliki keunggulan komparatif. Namun, apabila $KS \leq 0$ berarti kegiatan usaha tidak menguntungkan secara ekonomi.
- Analisis Efisiensi, dilihat dari nilai PCR DAN DRCR yakni jika nilai $PCR < 1$ artinya sistem produksi usahatani bawang merah semakin

kompetitif dan mampu membiayai faktor domestiknya pada harga privat dan kemampuannya tersebut akan meningkat. Dan apabila $PCR \geq 1$ sistem usahatani bawang merah tersebut tidak memiliki keunggulan kompetitif. Apabila $DRCR < 1$, maka sistem komoditas bawang merah mempunyai keunggulan komparatif. Sebaliknya jika $DRCR \geq 1$ maka sistem komoditas tidak memiliki keunggulan komparatif.

c. Dampak Kebijakan Pemerintah, terdiri dari :

- Dampak Kebijakan Output Kebijakan pemerintah terhadap output dijelaskan oleh nilai TO dan NPCO. Nilai TO positif menyebabkan timbulnya implisit subsidi atau transfer sumberdaya yang menambah keuntungan. Jika nilai TO bernilai negatif menyebabkan implisit pajak atau transfer sumberdaya yang mengurangi keuntungan.. Berdasarkan analisis PAM , apabila NPCO >1 berarti harga domestik lebih tinggi dari harga impor (atau ekspor) dan berarti sistem usahatani bawang merah tersebut menerima proteksi. Bila NPCO < 1 , harga privat lebih kecil dari harga dunia dengan kata lain produsen output memberikan transfer kepada pemerintah berarti harga privat di disproteksi.
- Dampak Kebijakan Input Dampak kebijakan pemerintah terhadap input *tradable* dijelaskan dengan TI dan NPCI sedangkan dampak kebijakan input domestik dijelaskan oleh TF. apabila $TI > 0$, menunjukkan adanya transfer dari petani ke produsen input *tradable*. Sebaliknya jika $TI \leq 0$, menunjukkan tidak adanya transfer dari petani ke produsen input *tradable*. Apabila NPCI ≥ 1 artinya biaya input domestik lebih mahal dari biaya input pada tingkat harga dunia dengan kata lain tidak ada kebijakan yang bersifat protektif terhadap input, tidak ada ada kebijakan subsidi terhadap input *tradable*. Bila NPCI < 1 , artinya harga domestik lebih rendah dari harga dunia yakni kebijakan bersifat protektif terhadap input dan ada kebijakan subsidi terhadap input *tradable*. Nilai TF menunjukkan besarnya subsidi terhadap input faktor domestik. Bila nilai TF > 0 berarti ada transfer dari petani kepada produsen input *tradable* sedangkan

$TF \leq 0$ artinya tidak ada transfer dari petani ke produsen input *tradable*.

- Dampak Kebijakan Input – Output ; Pengaruh kebijakan input - output dijelaskan melalui analisis EPC, NT , PC dan Rasio Subsidi Bagi Produsen SRP Nilai EPC >1 artinya kebijakan bersifat protektif , semakin besar nilai EPC semakin tinggi proteksi pemerintah terhadap komoditas domestik. Dan apabila nilai EPC ≤ 1 artinya kebijakan tidak bersifat protektif, tidak ada proteksi pemerintah terhadap komoditas domestik tersebut. Nilai NT > 0 menunjukkan adanya tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input dan output. Demikian juga sebaliknya bila nilai NT ≤ 0 menunjukkan tidak ada tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input dan output
Jika PC > 1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada produsen. Sebaliknya bila PC ≤ 1 artinya keseluruhan kebijakan pemerintah tidak memberikan insentif kepada produsen. Nilai SRP < 0 artinya kebijakan pemerintah yang berlaku selama ini menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya imbalan untuk berproduksi. Dan apabila nilai SRP ≥ 0 artinya kebijakan pemerintah yang berlaku selama ini tidak menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya imbalan untuk berproduksi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Daya Saing Terhadap Bawang Merah di Kabupaten Solok

Hasil empiris dari penelitian ini mengukur daya saing apakah sistem usahatani bawang merah pada lokasi penelitian memiliki keunggulan kompetitif dan komperatif. Alat analisis yang digunakan adalah *Policy Analysis Matrix* (PAM) berdasarkan data penerimaan dan biaya produksi yang terbagi dalam dua kategori yaitu harga privat (analisis finansial) dan harga sosial (analisis ekonomi). Hasil analisis berdasarkan perhitungan PAM dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel Policy Analysis Matrix (PAM) Komoditi Bawang Merah
di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok (ha/mt)

Keterangan	Penerimaan (Rp)	Biaya (Rp)		Keuntungan (Rp)
		Input Tradable	Faktor Domestik	
Harga Privat	159.693.508,11	29.197.837,08	29.149.761,47	101.345.909,56
Harga Sosial	21.865.966,29	16.670.314,94	23.175.768,08	(17.980.116,73)
Efek Divergensi	137.827.541,82	12.527.522,13	5.973.993,39	119.326.026,30

Indikator Analisis Model PAM	Nilai
Keunggulan kompetitif : 1. Keuntungan Privat (KP) 2. Rasio Biaya Privat (PCR)	Rp.101.345.909,56 0,22
• Keunggulan Komparatif 1. Keuntungan Sosial (KS) 2. Rasio Biaya Sumberdaya Domestik (DRC)	Rp (17.980.116,73) 5,61
• Kebijakan output 1. Transfer output (TO) 2. Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO)	Rp137.827.541,82 7,30
• Kebijakan input 1. Transfer Input (TI) 2. Koefisien Proteksi Nominal Input (NPCI) 3. Transfer Faktor (TF)	Rp. 12.527.522,13 1,75 Rp. 5.973.933,39
• Kebijakan Input – Output 1. Koefisien Proteksi Efektif (EPC) 2. Net Transfer (NT) 3. Koefisien Keuntungan (PC) 4. Rasio Subsidi bagi Produsen (SRP)	25,12 Rp 119.326.026,30 5,64 5,46

Sumber : data primer terolah, 2016

Perolehan hasil analisis PAM menunjukkan bahwa dari sisi keuntungan, besarnya keuntungan privat yang dinikmati oleh petani, lebih besar dari keuntungan sosial. Dimana pada analisis keuntungan privat bernilai positif yakni sebesar Rp 101.345.909,56, sedangkan pada keuntungan sosial bernilai negatif yaitu sebesar Rp (17.980.116,73). Hal ini disebabkan bahwa harga output yang diterima oleh petani lebih tinggi dari harga sosial artinya petani di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok mendapatkan insentif dalam memproduksi komoditas bawang merah. Sehingga usaha tani bawang merah ini secara finansial menguntungkan bagi petani setempat, akan tetapi pada analisis ekonomi merugikan.

Hasil Analisis keunggulan kompetitif digunakan untuk mengukur kelayakan finansial usahatani. Dari analisis keunggulan kompetitif usahatani bawang merah Kabupaten Solok layak diusahakan. Selain itu hasil analisis nilai koefisien PCR diperoleh sebesar 0,22 bahwa untuk mendapatkan nilai tambahan output sebesar satu -

satuan diperlukan tambahan biaya faktor domestik sebesar 0,22. Nilai PCR pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa usaha tani bawang merah yang dilakukan sudah efisien dan memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian Handewi *et al* (2001, hal.14) yang menyatakan bahwa di Kabupaten Agam Sumatera Barat untuk usahatani cabai keriting pada berbagai tipe irigasi dan musim memiliki keunggulan kompetitif yang ditunjukkan dengan nilai koefisien PCR < 1 yaitu berkisar antara 0,37 – 0,53.

Pada indikator analisis keunggulan komperatif, diperoleh keuntungan sosial bernilai negatif yaitu sebesar Rp (17.980.116,73) per hektar yang menunjukkan bahwa usahatani bawang merah di Nagari Sungai Nanam tidak menguntungkan secara ekonomi. Di sisi lain, untuk melihat keunggulan komperatif juga dapat dilihat dari nilai koefisien DRRCR yakni sebesar 5,61. Artinya bahwa usahatani bawang merah di lokasi penelitian tidak efisien secara ekonomi dan tidak mempunyai keunggulan komperatif. hal ini disebabkan biaya produksi (input

tradable dan faktor domestik) yang dikeluarkan petani lebih besar. Sehingga usaha memproduksi komoditas bawang merah di dalam negeri dengan tujuan memenuhi permintaan dalam negeri belum menguntungkan dan kalah bersaing dengan bawang merah impor. Biaya memproduksi bawang merah di kabupaten Solok sebesar 32% lebih tinggi dari biaya produksi bawang merah impor. Untuk itu diharapkan ada intervensi kebijakan pemerintah agar petani bisa mendapatkan harga pupuk, bibit serta pestisida dengan harga terjangkau, sehingga ada efisiensi biaya dalam memproduksi bawang merah di Nagari Sungai Nanam kabupaten Solok..

Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Daya Saing Bawang Merah di Kabupaten Solok **Dampak Kebijakan Input**

Nilai transfer input (TI) di lokasi penelitian ini diperoleh hasil yang positif yaitu Rp 12.527.522,13/ha. Nilai TI > 0 artinya adanya transfer dari petani ke produsen input *tradable*. Dengan kata lain, petani bawang merah di nagari Sungai Nanam membeli input – input produksi lebih tinggi dari yang seharusnya. Kebijakan pemerintah terhadap input yang berlaku di Indonesia adalah seperti subsidi pupuk, penetapan tarif impor input-input pertanian, dan subsidi bahan bakar minyak ternyata belum memberikan insentif positif kepada petani bawang merah.

Besarnya nilai TI di Nagari Sungai Nanam disebabkan oleh harga bibit yang cukup tinggi. Rata-rata penggunaan bibit di Nagari Sungai Nanam sebesar 783,71 Kg/ha dengan harga Rp 23.333,33/kg, sedangkan harga sosial dari bibit bawang merah jauh lebih kecil yaitu sebesar Rp 7.329,25/ kg. Selain itu juga kebijakan pemerintah pemberian subsidi pupuk belum berdampak terhadap nilai TI pada petani bawang merah di nagari Sungai nanam. Hal ini disebabkan oleh pengadaan dan penyaluran (distribusi) pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran. Menurut Sudjono (2011, hal.3) sistem distribusi dapat diartikan sebagai rangkaian mata rantai penghubung antara produsen dan konsumen dalam rangka menyalurkan produk/jasa sampai ke tangan konsumen secara efisien dan mudah dijangkau. Sistem penyaluran pupuk bersubsidi memerlukan pengawasan yang lebih ketat lagi dari pemerintah. Berdasarkan Permentan no 69/Permentan/SR.130/11/2012 ayat 6 pasal (2) menyatakan bahwa untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi haruslah sesuai dengan prinsip 6 tepat yaitu (1) tepat jumlah, (2) tepat mutu, (3) tepat tempat, (4) tepat harga, (5) tepat waktu dan (6) tepat jenisnya

Pada nilai NPCI yang diperoleh lebih besar dari satu yaitu sebesar 1,75 artinya bahwa

pemerintah melakukan proteksi terhadap produsen input *tradable* sedangkan petani sebagai konsumen yang menggunakan input tersebut merasa dirugikan dengan tingginya harga sarana produksi. Nilai NPCI sebesar 1,75 merupakan nilai transfer yang yang dinikmati perusahaan pupuk kimia selisih harga pupuk yang dibayar oleh petani pada harga aktual dengan harga yang seharusnya dibayar oleh petani pada harga sosial. Komponen input *tradable* selanjutnya yaitu pestisida, penggunaan pestisida pada nagari penelitian sangat tergolong tinggi. Berdasarkan penelitian Asnita (2010, hal.2) menyimpulkan bahwa bawang merah di kecamatan Lembah Gumanti umumnya menggunakan pestisida dari golongan *organoposfat*, *piretroid* dan *karbamat*. Umumnya petani menyadari bahwa bahaya penggunaan pestisida, namun penggunaan pestisida masih dalam intensitas tinggi. Penggunaan pestisida di kecamatan Lembah Gumanti terhadap bawang merah telah melewati nilai BMR (Batas Minimum Residu). Ketergantungan terhadap pestisida juga sudah tinggi sehingga petani harus menggunakan pestisida dalam pemeliharaan tanaman bawang merah. Sehingga berapa pun harga pestisida, petani bawang merah di Nagari Sungai Nanam akan tetap membelinya. Untuk penggunaan pestisida (padat dan cair) di Nagari Sungai Nanam memiliki biaya yang dikeluarkan harga privat dan harga sosial yang sama yaitu pestisida cair Rp 3.207.415,73/ha/mt dan pestisida padat Rp 4.585.674,16./ha/mt

Nilai transfer faktor (TF) menunjukkan besarnya intervensi pemerintah terhadap input *non tradable*. Adapun input *non tradable* yang digunakan meliputi, lahan, tenaga kerja, pupuk kandang dan peralatan. Dari hasil yang di peroleh yaitu Rp5.973.933,39 mengindikasikan bahwa petani membayar input *non tradable* lebih tinggi dari harga sebenarnya seperti harga privat upah tenaga kerja yang lebih besar dari harga sosial artinya bahwa tidak ada implisit subsidi atau transfer dari produsen faktor domestik ke petani sehingga faktor domestik privat lebih tinggi dari harga sosial. Salah satu penyebab perbedaan nilai faktor domestik privat dengan faktor domestik sosial terletak pada upah tenaga kerja. Besarnya rata – rata upah tenaga kerja per hari yaitu Rp 67.000 .

Dampak Kebijakan Output

Berdasarkan nilai TO, bahwa petani bawang merah menerima keuntungan sebesar Rp 137.827.541,82/Ha. Hal ini terjadi karena harga sosial bawang merah yang dihitung berdasarkan harga di pasar internasional lebih rendah daripada harga bawang lokal. Disisi lain tingginya harga bawang merah lokal membuat bawang merah lokal sulit bersaing dengan bawang merah impor namun

disisi lain pendapatan yang diperoleh petani semakin diuntungkan.

Nilai NPCO bawang merah Nagari Sungai Nanam yaitu 7,30. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kebijakan pemerintah sehingga mengakibatkan harga privat bawang merah lebih tinggi daripada harga sosialnya. Nilai NPCO yang bernilai lebih besar dari satu juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap output berjalan efektif. Kebijakan pemerintah yang dimaksud adalah kebijakan pembatasan impor berbasis kuota yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.60/ PERMENTAN/OT.140/9/2012 dan No.47/PERMENTAN/OT.140/4/2013. Pembatasan impor berbasis kuota merupakan kebijakan pembatasan impor yang didasarkan atau kemampuan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selisih antara jumlah produksi dengan jumlah kebutuhan dalam negeri itulah yang menjadi dasar dalam menentukan batas maksimum jumlah impor yang diizinkan.

Penerapan kebijakan pembatasan impor berbasis kuota telah memberikan dampak terhadap fluktuasi harga bawang merah domestik yang sangat signifikan. Namun di lain pihak konsumen bawang merah dirugikan dengan tingginya harga tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Wahyudin *et all* (2015, hal.351) menyatakan bahwa kebijakan pembatasan impor berbasis kuota telah membuat keuntungan usahatani lebih tinggi dari keuntungan yang seharusnya dalam kondisi pasar persaingan sempurna, hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan pembatasan impor berbasis kuota telah menyebabkan profitabilitas usahatani bawang merah di Kabupaten Probolinggo meningkat hingga mencapai 270%.

Dampak Kebijakan Input - Output

Nilai EPC bernilai lebih dari satu yaitu 25,12 artinya kebijakan pemerintah memberikan dukungan terhadap aktifitas produksi bawang merah dalam negeri dimana harga output lebih tinggi dari harga yang sosialnya. Besarnya proteksi yang diterima petani terhadap output sebesar 87% dari harga sosial. Nilai NT bernilai positif yaitu Rp 119.326.026,30/Ha. Nilai PC sebesar 5,67 yang artinya bahwa petani mengalami keuntungan karena keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada petani. Walaupun kebijakan pemerintah terhadap input tradable masih belum protektif sehingga petani harus membayar input tradable lebih besar dari harga seharusnya yaitu sebesar 31,76%.

Nilai SRP di Nagari Sungai Nanam bernilai positif yakni sebesar 5,46 artinya kebijakan pemerintah terhadap output telah menguntungkan

petani, karena harga output lebih tinggi dari harga seharusnya. Dengan adanya Kebijakan pemerintah pada output telah meningkatkan penerimaan petani bawang merah di Nagari Sungai Nanam sebesar 86% dibanding dengan penerimaan sosial. Dengan artian telah terjadi transfer dari pemerintah atau konsumen kepada petani sehingga petani menikmati tambahan keuntungan sebesar nilai SRP.

Kebijakan pemerintah pada input dan output memberikan dukungan dalam pengembangan komoditas bawang merah lokal dan mampu memberikan insentif bagi petani. Walaupun kebijakan pemerintah yang ada memberikan dampak yang saling bertolak belakang. Pada saat kedua kebijakan pemerintah terhadap input maupun output dilaksanakan secara simultan mampu memberikan insentif positif terhadap peningkatan penerimaan dan daya saing usahatani bawang merah di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.

KESIMPULAN DAN SARAN

Usahatani bawang merah di Kabupaten Solok menguntungkan bagi petani secara finansial namun secara ekonomi tidak. Bawang merah Kabupaten Solok memiliki keunggulan kompetitif namun dari segi keunggulan komparatif, bawang merah Kabupaten Solok tidak unggul. Hal ini disebabkan oleh kurang efisiennya dalam pengusahaan bawang merah, dimana biaya produksi privat lebih besar dari biaya yang seharusnya.

Kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input maupun output secara simultan memberikan dampak bagi petani bawang merah di Kabupaten Solok. Tingkat proteksi kebijakan pemerintah terhadap input produksi tradable pada lokasi penelitian masih rendah. Hal ini sangatlah merugikan petani karena petani harus mengeluarkan ongkos produksi yang besar dari biaya yang seharusnya. Sedangkan tingkat proteksi pemerintah pada output sudah berjalan efektif. Kebijakan pemerintah terhadap output telah mengakibatkan harga privat output bawang merah di Kabupaten Solok lebih tinggi dari pada harga sosialnya.

Bagi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan nilai daya saing bawang merah Kabupaten Solok, dengan memfasilitasi penggunaan input agar usahatani bawang merah lebih efisien. Kebijakan pemerintah terhadap input dan output perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi apakah kebijakan yang telah berjalan tepat sasaran dan tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Pedagang pasar raya padang hanya menjual 5 persen bawang merah lokal* <http://sumbarsatu.com> [05 desember 2015].
- Ainun, M., Nurhayati dan Susilawati, D. 2011. *Pengaruh Pemberian Pupuk Organik dan Jenis Mulsa Organik Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kedelai (Glycine max L)*. Jurnal Floratek. 16 (6):192 – 201 hal.
- Amelia, Fitri.2009. *Analisis Daya Saing Jahe Indonesia di Pasar Internasional*. [Tesis]. Bogor . Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. 116 hal
- Asnita,N. 2010 *Dampak Penggunaan Pestisida Terhadap Keanekaragaman Arthropoda dan Residunya pada Tanaman Bawang Merah (Allium Cepa Var Ascolonicum) di Kecamatan Lembah Gumanti Sumatera Barat*. [skripsi]. Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. 130 hal
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2014. *Memperkuat Daya Saing Produk Pertanian*. IAARD Press Jakarta. 632 hal.
- [BPS] Badan Pusat Statistik.2014. *Sumatera Barat dalam Angka*. 2014. BPS. Jakarta
- _____. 2014 *Statistik Pertanian*.BPS. Jakarta
- _____. 2014. *Kabupaten Solok dalam Angka*. BPS. Kabupaten Solok.
- Darwis,V. dan Nurmanaf. 2004. *Kebijakan Dsitribusi, Tingkat Harga Dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani*. Forum Pengkajian Agroekonomi . Vol 22 No 1 Juli 2004. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. 63 -73 hal.
- Daryanto,A. 2009. *Posisi Daya Saing Pertanian Indonesia dan Upaya Peningkatannya*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor. 33 hal.
- Handewi .P.S, Rachman,Supriyati, Saptana, Benny,R . 2001. *Efisiensi dan Daya SaingUsahatani Hortikultura*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. 50 - 85 hal
- Husodo,S,Y. 2004. *Pertanian Mandiri*. Penebar Swadaya. Jakarta. 204 hal.
- Novianto, Joko. 2012. *Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Kentang di Kabupaten Wonosobo*. [Skripsi]. Bogor. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. 138 hal.
- Pearson, *et.al*.2005. *Aplikasi Policy Analysis Matrix Pada Pertanian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 397 hal.
- Porter, Micahel E. 2002. *Strategi Bersaing Teknis Menganalisis Industri dan Pesaing*. Penerbit Erlangga. Jakarta. 338 hal
- Rahayu, E., Berlian, N. 2004. *Mengenal Varietas Unggul dan Cara Budidaya Kontinyu Bawang Merah*. Penebar Swadaya, Jakarta. 16 -29 hal.
- Rouf,A,A. 2014. *Analisis Daya Saing Komoditas Sapi Potong di Kabupaten Gorontalo*. [Tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor. 127 hal
- Rum,M. 2010. *Analisis Usaha Tani Dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait Komoditas Cabai Besar di Kabupaten Malang*. EMBRYO Vol 7 No 2. Desember 2010. 139 - 143 hal.
- Saptana, Sumaryanto dan S, Friyatno. 2001. *Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Komoditas Kentang dan Kubis di Wonosobo Jawa Tengah*. Soca 3 (1) : 83 -98 hal .
- Sudjono,S. 2011. *Sistem Distribusi Berbasis Relationship Kajian Penyempurnaan Penyaluran Pupuk Berusbsidi Kepada Petani*. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang. 313 -330 hal.
- Salvatore,D. 1997. *Ekonomi Internasional*. Edisi ke-5. Erlangga, Jakarta. 456 hal
- Wahyudin,M, M.Maksum, dan H. Yuliando. 2015. *Dampak Kebijakan Pembatasan Impor Bawang Merah Terhadap Usahatani Bawang Merah di Kabupaten Proboinggo*. Agritech Vol 35 No 3 Agustus 2015. 347 – 352 hal.

Biodata Penulis

Mega Putri Nolasary. SP.M.Si. Lahir di Balikpapan, tanggal 3 April 1987. Alamat rumah : Jl. Air Camar, rt : 002 Rw : 007. Kel, Parak gadang timur, Padang timur. Pekerjaan sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa padang..